

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Diana Halim Koencoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Granit.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- I Gusti Ayu Ketut, Edi As'Adi. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas Achmad Santosa. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Ricki M. Mulia. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ridwan H. R. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soewarno Hadyaningrat. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sodikin. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: In Media.
- Tri Cahyono. 2017. *Penyehatan Udara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Ariani Arifin, Dian Utami Mas Bakar. *Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan: Vol. 4 Nomor 2.
- Muh. Hasrul. *Penaatan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota*. Jurnal PERSPEKTIF.
- Suparto Wijoyo. 2012. *Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya*, Yuridikia: Vol. 27 Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Zulkifli Aspan. 2017. *Advokasi Litigasi Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*. Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

LAPORAN

- Komisi Yudisial. *Laporan Survei Perbuatan Yang Merendahkan atau Merusak Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

INTERNET

- https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/7812/RSNI3-Udara-Ambien---Berikan-Pendapat-untuk-Udara-Sehat.... Diakses pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 8:15 WIB.
- Industri adalah kegiatan manufaktur, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3872902/industri-adalah-kegiatan-manufaktur-ini-pengertian-menurut-para-ahli-dan-jenisnya>, Diakses pada 3 September 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
- Keputusan Strategis Daerah DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor : 6676/1.051.84

- Dasar
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 - c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Pengumuman Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 137 Tahun 2020 Tanggal 11 November 2020 Tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian/Surat Keterangan Penelitian;
 - e. Surat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor: 2604/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal : Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Suryani Sakinah
NPM : B12116512
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Untuk : Mengajukan permohonan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengawasan Syarat Perizinan Pada Pabrik Bercerobong Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
2. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, agar dapat menyerahkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Surat Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan tersebut kepada yang bersangkutan agar menghubungi Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sepergunanya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,

Drs. Syarifuddin, M.Si
NIP 197301011992031004

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.